



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT  
**SUB UNIT KERJA** : INSPEKTORAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : KAILANI
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 71652

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 476.030.000

1. Tanah Seluas 292 m2 di BATANG HARI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 11.680.000
2. Tanah Seluas 800 m2 di BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
3. Tanah Seluas 805 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 56.350.000
4. Tanah Seluas 140 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 877 m2/200 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 145.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 64.623.400

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 180.785.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----



Sub Total	Rp.	866.938.400
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	866.938.400

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.